



Dengan menjalankan kedai kopinya sendiri, Haswin, mantan narapidana kasus narkoba berusia 32 tahun, mengubah hidupnya setelah keluar dari Lapas Tangerang pada Januari 2022. Baca kisahnya, "Mempersiapkan diri untuk bebas: narapidana belajar keterampilan, mengejar gelar di balik jeruji besi."

Buletin 2023

Januari - April

Proyek Sorotan

Mempersiapkan Diri untuk Bebas: Narapidana Belajar Keterampilan, Mengejar Gelar di Balik Jeruji Besi

Berita

- Untuk Setiap Anak, Vaksinasi
- ILO Meluncurkan Buku Panduan Kesetaraan Gender dan Inklusi Sosial Pertama untuk Institusi Pendidikan Tinggi
- Inisiatif Bersama tentang Inklusi Disabilitas dalam Penanggulangan Bencana dan Aksi Kemanusiaan yang Dipimpin oleh OCHA

SDG Fokus



Info
Lebih
Lanjut





Kata Pengantar

Dari Catatan Koordinator Residen PBB

Para pembaca yang budiman,

Selamat datang di edisi pertama Buletin PBB di Indonesia untuk tahun 2023.

Pada Mei 2023, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah mencabut status COVID-19 sebagai keadaan darurat global, sebuah kabar baik bagi kemanusiaan. Pandemi ini memang telah mengganggu kemajuan kita dan membuat banyak inisiatif tertunda. Saat ini, kita harus segera mengganti waktu yang hilang dalam mengejar Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Hal ini membutuhkan kemitraan dan kerja sama yang kuat antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil.

Inilah sebabnya fokus SDG dalam buku ini adalah SDG 17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan. Kemitraan berbagai pemangku kepentingan sangat penting untuk meningkatkan SDG guna meningkatkan efektivitas dan dampaknya serta mempercepat kemajuan dalam pencapaiannya.

Edisi ini menampilkan sorotan dari hasil kerja PBB di Indonesia antara bulan Januari dan April 2023. Inklusivitas merupakan inti dari hal tersebut, sejalan dengan semangat dan janji Agenda 2030 - untuk tidak meninggalkan siapa pun di belakang. Kami berbagi cerita dari badan-badan PBB di Indonesia, yang menunjukkan kerja luar biasa mereka dalam membawa PBB lebih dekat dengan masyarakat yang dilayaninya tanpa meninggalkan siapa pun.

Salah satu proyek yang ditampilkan dalam edisi ini adalah kisah inspiratif tentang narapidana di Lapas Pemuda Kelas IIA Tangerang. Didukung oleh UNODC, fasilitas ini telah menerapkan program pelatihan kejuruan yang memberikan para narapidana keterampilan penting untuk berhasil berintegrasi kembali ke masyarakat setelah menyelesaikan hukuman mereka.

Mari kita perkuat dampak kolektif kita dan membangun jalur baru untuk mencapai SDGs! Kami harap Anda menikmati membaca buletin edisi kali ini.

Terima kasih atas dukungan Anda.

Valerie Julliard
Kepala Perwakilan PBB

Kemitraan adalah Kunci untuk Mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Dengan bekerja sama, negara-negara dapat menciptakan masa depan yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan untuk semua.

Tujuan 17 adalah tentang merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan di dunia pasca pandemi. Kebutuhan mendesak untuk memperkuat multilateralisme dan membina kemitraan global tidak pernah lebih nyata. Tantangan yang saling terkait menuntut tindakan kolektif dan solusi kolaboratif.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan tetap menjadi kerangka acuan untuk membangun kembali dengan lebih baik. Kita membutuhkan semua pihak untuk bersatu - pemerintah, masyarakat sipil, ilmuwan, akademisi, dan sektor swasta.

Kemitraan memungkinkan kita untuk memfasilitasi berbagi pengetahuan, mobilisasi sumber daya, keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, dan respons kolektif terhadap tantangan global.

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang Tujuan #17 dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan lainnya, kunjungi: <http://www.un.org/sustainabledevelopment>





Mempersiapkan Diri untuk Bebas: Narapidana Belajar Keterampilan, Mengejar Gelar di Balik Jeruji Besi

Denny, 31 tahun, tinggal menyisakan sekitar dua tahun lagi dari masa hukumannya selama lima tahun, dan ia berharap dapat bekerja di sebuah kafe ketika ia keluar nanti. "Saya ingin memanfaatkan waktu saya sebaik-baiknya meski di penjara, dan pelatihan ini akan membantu saya mendapatkan pekerjaan nantinya," katanya.

Denny adalah salah satu dari 200 narapidana di Lapas Kelas IIA Tangerang yang mengikuti pelatihan keterampilan, dan salah satu dari lebih dari 35.000 narapidana di seluruh Indonesia yang terlibat dalam berbagai jenis pelatihan keterampilan, seperti membatik, eco-printing pada tekstil, membuat sabun, beternak, menyulam, dan lain-lain. Beberapa narapidana lainnya juga terlibat dalam olahraga profesional dan dapat mengikuti kompetisi di luar penjara. Program pelatihan kejuruan yang didukung oleh PBB ini akan membantu mereka untuk berintegrasi kembali ke dalam masyarakat setelah mereka selesai menjalani hukuman.

Meskipun sebagian besar Lapas menawarkan pendidikan kejuruan, Lapas Pemuda Kelas IIA Tangerang adalah satu-satunya di Indonesia yang memiliki program pendidikan universitas - yang dapat diikuti oleh para narapidana dari seluruh Indonesia. Saat ini, 200 narapidana sedang menempuh pendidikan di universitas sebagai bagian dari program percontohan, yang dapat diluncurkan di seluruh Indonesia tergantung pada pendanaan.

Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Narkoba dan Kejahatan (UNODC) telah mengembangkan kemitraan dengan Direktorat Jenderal Pemasarakan untuk menilai kesesuaian narapidana untuk program ini dengan menggunakan serangkaian alat penilaian khusus. UNODC juga berkolaborasi dan mendukung LSM seperti Second Chance, yang membantu narapidana untuk berintegrasi kembali ke dalam masyarakat setelah mereka keluar dari fasilitas tersebut.

Versi lengkap artikel ini akan dipublikasi di news.un.org pada 4 Juni.

"Hidup saya jauh lebih baik sekarang. Saya lebih puas dengan hidup dan bangga dengan kreativitas saya. Saya tidak pernah menyangka bisa menemukan karier di luar dunia malam. Saya tidak lagi melihat pekerjaan saya hanya sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup. Saya ingin mematahkan stigma 'mantan narapidana' dengan menunjukkan bahwa mantan pelaku kejahatan juga bisa mandiri dan kreatif."

- Haswin -



Badan PBB yang terlibat



UN di Indonesia Buletin 2023 | Vol. 1

Inisiatif Bersama tentang Inklusi Disabilitas dalam Penanggulangan Bencana dan Aksi Kemanusiaan yang Dipimpin oleh UN-OCHA

Bencana menimbulkan tantangan yang signifikan - terlebih lagi bagi para penyandang disabilitas. Menyadari pentingnya inklusivitas dan memastikan kesejahteraan semua individu, Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB (OCHA) dan Tim Nasional Kemanusiaan di Indonesia menyelenggarakan lokakarya multipihak yang mempertemukan para pemangku kepentingan utama, termasuk Organisasi Penyandang Disabilitas (OPD).

Tujuan dari pelatihan ini adalah untuk menekankan pentingnya melibatkan penyandang disabilitas dalam rencana penanggulangan darurat bencana. Dengan melibatkan OPD dan organisasi terkait lainnya secara aktif, kami mempromosikan inklusivitas, mengidentifikasi hambatan yang ada, dan mengembangkan strategi untuk menghilangkannya. Pendekatan kolaboratif ini menyadari bahwa penyandang disabilitas memiliki wawasan dan perspektif yang sangat berharga yang dapat berkontribusi pada kesiapsiagaan dan tanggap darurat bencana yang lebih efektif dan komprehensif.

Salah satu hasil penting dari pelatihan ini adalah teridentifikasinya berbagai hambatan yang menghalangi akses para penyandang disabilitas untuk mendapatkan bantuan yang tepat pada saat terjadi bencana. Dengan mengetahui hambatan-hambatan ini, para pemangku kepentingan menjadi lebih siap untuk mengembangkan solusi yang tepat sasaran dan memastikan bahwa mekanisme tanggap bencana bersifat inklusif, mudah diakses, dan tanggap terhadap kebutuhan para penyandang disabilitas.

Badan PBB
yang terlibat



© Rizky Ashar/UNIC

Untuk Setiap Anak, Vaksinasi

Dunia sedang menghadapi peringatan darurat untuk kesehatan anak-anak: Cakupan vaksinasi menurun tajam selama pandemi COVID-19, membuat jutaan anak tidak terlindungi dari beberapa penyakit paling serius di masa kanak-kanak. Selain itu, jutaan anak dari beberapa komunitas yang paling rentan di dunia telah lama tidak mendapatkan vaksinasi yang dapat menyelamatkan nyawa. Pengejaran dan pemulihan sangat dibutuhkan untuk memvaksinasi semua anak dan menghindari kemunduran lebih lanjut.

Untuk mengatasi krisis ini, UNICEF menyerukan kepada pemerintah untuk menggandakan komitmen mereka dalam meningkatkan pembiayaan imunisasi dan bekerja sama dengan para pemangku kepentingan untuk memanfaatkan sumber daya yang tersedia, termasuk sisa dana COVID-19, untuk segera melaksanakan dan mempercepat upaya vaksinasi catch-up untuk melindungi anak-anak dan mencegah wabah penyakit.

Baca "Kondisi Anak-Anak Dunia 2023: Untuk setiap Anak, Vaksinasi" [di sini](#).

Badan PBB
yang terlibat



Rencana Aksi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)/Aksesibilitas Digital

Pada bulan Januari, PBB di Indonesia meluncurkan rencana aksi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)/Aksesibilitas Digital (2023-2024), yang terdiri dari 20 kegiatan dengan tujuan untuk mencapai kesetaraan akses terhadap konten digital PBB bagi semua orang, baik dari segi waktu, konten, maupun biaya, tanpa memandang disabilitas dan kondisi orang tersebut. Dengan melibatkan Tim Manajemen Operasi (Sumber Daya Manusia, Pasokan, Teknologi Informasi dan Komunikasi) dan Kelompok Komunikasi PBB, rencana ini akan berkontribusi untuk meningkatkan proses, memperkuat kompetensi staf, memupuk budaya inklusif, dan meningkatkan kolaborasi.

Sebagai bagian dari upaya ini, Kantor Koordinator Residen (RCO) mengadakan dua sesi pelatihan tentang dokumen dan pertemuan pada bulan Januari, yang dapat diakses khusus untuk staf dan personil PBB di Indonesia. Selain itu, jaringan advokasi inklusi disabilitas antar lembaga juga dibentuk, yang terdiri dari 22 advokat dari 10 lembaga yang secara sukarela mendukung implementasi rencana aksi TIK/Aksesibilitas Digital. Panduan inklusi disabilitas dan sumber daya pelatihan juga ditambahkan ke dalam Buku Sambutan Staf PBB di Indonesia.



Badan PBB
yang terlibat



UNITED NATIONS
INDONESIA



UNITED NATIONS
DEVELOPMENT
COORDINATION
OFFICE

ILO Meluncurkan Buku Panduan Kesetaraan Gender dan Inklusi Sosial Pertama untuk Institusi Pendidikan Tinggi

Sebagai upaya untuk mempromosikan inklusi sosial dan mencegah kekerasan seksual di sektor akademik, Organisasi Buruh Internasional (ILO) meluncurkan pedoman dan manual pelatihan, "Mempromosikan Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial (GEDSI) serta Mencegah dan Menangani Kekerasan Seksual di Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kejuruan", pada tanggal 24 Januari di Jakarta. Inisiatif ini merupakan bagian dari program Keterampilan untuk Kesejahteraan (Skills for Prosperity/SfP) ILO di Indonesia yang didanai oleh Pemerintah Inggris.



"Pedoman dan panduan pelatihan ini penting untuk memastikan bahwa siswa dan guru dapat belajar dan bekerja di institusi pendidikan tanpa rasa takut akan kekerasan dan pelecehan seksual. Kami berharap hal ini akan memberdayakan kaum muda dan institusi pendidikan tinggi untuk menjadi bagian dari aksi global dan nasional untuk menciptakan dunia kerja di Indonesia yang bebas dari kekerasan dan pelecehan," ujar Michiko Miyamoto, Direktur ILO untuk Indonesia dan Timor Leste.

Baca lebih lanjut [di sini](#).

Badan PBB
yang terlibat



International
Labour
Organization



Meningkatkan Koordinasi Layanan Kekerasan Berbasis Gender bagi Pekerja Migran Perempuan di Indonesia

Menurut Badan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, sebanyak 172.448 penduduk Lampung telah bekerja di luar negeri dalam lima tahun terakhir. Dari jumlah tersebut, mayoritasnya adalah perempuan, kebanyakan bekerja di sektor domestik. Banyak dari mereka yang bekerja melalui jalur yang tidak resmi, dengan angka perdagangan orang diperkirakan meningkat dua kali lipat selama pandemi, sementara permintaan perlindungan bagi saksi dan korban meningkat 15 persen.

Bekerja sama dengan LAdA (Lembaga Advokasi Anak) DAMAR Women Crisis Center, UN Women Safe and Fair Programme mendukung peningkatan layanan bagi pekerja migran perempuan yang menjadi korban kekerasan dan perdagangan orang di provinsi Lampung. Upaya penguatan layanan tersebut dilakukan dengan mendukung penyusunan standar operasional prosedur (SOP) untuk mekanisme layanan dan rujukan yang terkoordinasi bagi perempuan dan anak korban kekerasan, termasuk perempuan pekerja migran.

Cari tahu lebih lanjut [di sini](#).

Badan PBB yang terlibat:



Indonesia Luncurkan Strategi Nasional Digitalisasi Pertanian

Meskipun lahan pertanian mencakup 32% dari total luas lahan di Indonesia, dan sektor ini menyumbang 14% dari PDB, produksi pertanian menghadapi beberapa tantangan besar seperti biaya tinggi, dan kurangnya manfaat substantif yang mengalir ke petani kecil.

Untuk mengatasi tantangan ini dan memanfaatkan peluang digital yang muncul, FAO - bekerja sama dengan Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian (CADIS) dari Kementerian Pertanian - untuk pertama kalinya meluncurkan strategi digitalisasi pertanian yang disebut "Strategi Nasional e-Agriculture", yang dapat memanfaatkan sumber daya data dan informasi di bidang pertanian untuk kepentingan petani. Menurut peta jalan Strategi Nasional e-Agriculture, pada tahun 2027 Indonesia akan memiliki basis data yang terintegrasi untuk lahan pertanian dan petani, menyediakan sistem peringatan dini digital untuk bencana yang mengancam produksi pertanian dan menjalankan sistem untuk pengumpulan, ekstraksi, dan analisis data pertanian.

Baca lebih lanjut [di sini](#).

Badan PBB yang terlibat:



Food and Agriculture Organization of the United Nations



© Harriansyah/FAO Indonesia

Deteksi dan Pengobatan Malaria untuk Masyarakat Adat Orang Rimbo

Badan PBB yang terlibat:



Malaria adalah penyakit yang umum terjadi di kalangan masyarakat adat Orang Rimbo di Riau. Namun, mereka menghadapi berbagai hambatan dalam mengakses layanan kesehatan: gaya hidup nomaden, sulitnya berkomunikasi dengan petugas kesehatan karena kendala bahasa, isolasi geografis, akses jalan yang terbatas, dan biaya transportasi yang tinggi adalah masalah yang paling umum.

Sebagai bagian dari upaya untuk tidak meninggalkan siapa pun dalam pelayanan kesehatan, Kementerian Kesehatan bersama dengan WHO dan Oxford University Clinical Research Unit - Indonesia (OUCRU - Indonesia) melakukan analisis dan pemetaan situasi layanan malaria dan hambatan pada komunitas Orang Rimbo sebagai perwakilan komunitas suku asli yang terkena dampak malaria di Indonesia. Selain itu, tim dari Puskesmas terdekat akan menjangkau dan memberikan layanan kesehatan, termasuk deteksi dan pengobatan malaria. Hal ini akan berkontribusi dalam mengurangi kasus dan kematian akibat malaria di komunitas Orang Rimbo.

Baca lebih lanjut [di sini](#).



© Oxford University Clinical Research Unit – Indonesia (OUCRU – Indonesia)

Hari Perempuan Internasional

Residen Koordinator melakukan perjalanan ke Yogyakarta untuk memperingati Hari Perempuan Internasional 2023. Ia mengunjungi inisiatif bersama PBB yang didukung oleh UN Women dan UNDP yang berhasil mengatasi kesenjangan gender digital dan menyoroti pentingnya mengurangi pengucilan perempuan dari dunia digital. Selama perjalanannya, Residen Koordinator bertemu dengan enam wirausahawan perempuan yang memperjuangkan kemajuan teknologi transformatif, organisasi masyarakat sipil, dan sektor swasta lokal. Beliau juga memberikan kuliah umum tentang kesetaraan gender di Universitas Gadjah Mada dan berbicara kepada media lokal.



Forum Data Dunia

PBB di Indonesia berpartisipasi dalam Forum Data Dunia PBB pada tahun 2023 di Hangzhou, China. Hampir 2.000 peserta dari 140 negara selama empat hari membahas pengumpulan dan penggunaan data yang lebih baik untuk mempercepat pencapaian SDGs. PBB di Indonesia menyelenggarakan stan untuk menunjukkan bagaimana badan-badan PBB di Indonesia mendukung Badan Pusat Statistik (BPS) dan lembaga pemerintah lainnya dalam pengumpulan dan analisis data, dengan penekanan khusus pada data masyarakat rentan dan segmen populasi.

Dalam acara tersebut, BPS berbagi pengalamannya dalam melaksanakan Sensus Penduduk 2020, yang dilaksanakan dengan dukungan PBB di Indonesia, yang menunjukkan transisi dari sensus tradisional ke penggunaan data administratif untuk mendukung sensus. BPS juga berpartisipasi dalam acara sampingan untuk berbagi pengalaman mereka dalam

big data. Direktur UNIC Jakarta, Miklos Gaspar, juga hadir untuk memimpin diskusi di Forum tentang pentingnya mengkomunikasikan dampak data kepada pembuat kebijakan dan masyarakat luas, dengan menampilkan contoh-contoh dari Indonesia.



Pelatihan Pembaruan Perlindungan dari Eksploitasi Seksual, Kekerasan, dan Pelecehan Seksual (PSEAH) untuk Tim Internal



Pada tanggal 02 April 2023, Strategi PSEAH 2022-2025 United Nations Country Team (UNCT) dan kerangka acuan yang menyertai bagi mereka yang berperan dalam koordinasi dan akuntabilitas PSEAH telah diselesaikan untuk pertama kalinya. Dokumen-dokumen ini mengartikulasikan visi dan komitmen bersama UNCT untuk mencegah dan merespons Eksploitasi Seksual, Kekerasan, dan Pelecehan Seksual (SEAH) yang dituangkan dalam empat tujuan strategis: kepemimpinan, pencegahan, respons, dan peningkatan kesadaran. Tujuan-tujuan ini menguraikan bagaimana para pelaku pembangunan dan kemanusiaan harus menciptakan lingkungan yang bebas dari SEAH, di mana personil dan anggota masyarakat merasa aman dan diberdayakan untuk melaporkan SEAH, dan di mana para korban/pengadu akan ditangani secara tepat waktu dan sesuai dengan menggunakan pendekatan yang berpusat pada

korban. Penyusunan Strategi ini dipimpin oleh Koordinator PSEAH dan Ketua Bersama Jaringan PSEAH, dengan dukungan dari anggota Jaringan PSEAH Indonesia.

Pada tanggal 14 April 2023, PBB di Indonesia meluncurkan 'microsite' Perlindungan dari Eksploitasi Seksual dan Pelecehan Seksual (PSEAH) yang pertama di dalam situs web United Nations Country Team. Laman microsite yang tersedia dalam bahasa Inggris dan Indonesia ini memberikan informasi yang jelas mengenai apa yang dimaksud dengan SEAH dan bagaimana cara melaporkan dugaan SEAH, serta daftar sumber-sumber yang dapat digunakan untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Selain itu, microsite ini juga berisi formulir pelaporan rahasia baru yang ditujukan langsung kepada Koordinator PSEAH yang tersedia dalam bahasa Inggris dan Indonesia bagi siapa saja yang ingin menyampaikan pengaduan SEAH terhadap personil dan mitra PBB.





© UNICEF/Michele Sibiloni



Januari

- 4: Hari Braille Sedunia
- 22: Hari Pejalan Kaki Nasional
- 25: Hari Pendidikan Internasional & Hari Gizi Nasional
- 30: Peringatan 3 tahun Deklarasi Darurat Kesehatan Masyarakat COVID-19

Februari

- 1 - 7: Pekan Kerukunan Antar Umat Beragama Sedunia
- 2: Hari Lahan Basah Sedunia
- 6: Hari Internasional Nol Toleransi terhadap Mutilasi Alat Kelamin Perempuan
- 9: Hari Pers Nasional
- 11: Hari Internasional Perempuan dan Anak Perempuan dalam Sains
- 13: Hari Radio Sedunia
- 15: Hari Kanker Anak Sedunia
- 20: Hari Keadilan Sosial Sedunia
- 21: Hari Kesadaran Sampah Nasional
- 21: Hari Bahasa Ibu Internasional

Maret

- 1: Hari Tanpa Diskriminasi
- 3: Hari Satwa Liar Sedunia
- 8: Hari Perempuan Internasional
- 9: Hari Musik Nasional
- 8: Hari Perempuan Internasional
- 17: Hari Perawat Nasional
- 20: Hari Kebahagiaan Internasional
- 21: Hari Internasional untuk Penghapusan Diskriminasi Rasial, Hari Puisi Sedunia, Hari Sindrom Down, dan Hari Hutan Internasional
- 22: Hari Air Sedunia
- 24: Hari Tuberkulosis Sedunia
- 25: Jam Bumi
- 30: Hari Film Nasional

April

- 2: Hari Kesadaran Autisme Sedunia
- 6: Hari Olahraga Internasional untuk Pembangunan dan Perdamaian dan Hari Nelayan Nasional
- 7: Hari Kesehatan Dunia
- 17-28: Forum Permanen tentang Isu-isu Masyarakat Adat
- 21: Hari Kreativitas dan Inovasi Dunia dan Hari Kartini
- 22: Hari Ibu Bumi Internasional
- 28: Hari Keselamatan dan Kesehatan Kerja Sedunia

Tentang UN di Indonesia

Bagikan cerita Anda kepada kami!

Kirimkan artikel, blog, dan cerita foto Anda ke: unic-jakarta@un.org

indonesia.un.org

United Nations in Indonesia

@UNinIndonesia

@uninindonesia



**UNITED NATIONS
INDONESIA**



Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) adalah organisasi internasional yang didirikan pada tahun 1945. Saat ini PBB terdiri dari 193 negara anggota. Misi dan kerja PBB dipandu oleh tujuan dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Piagam Pendiriannya. Di Indonesia, PBB berkomitmen untuk mendukung Pemerintah Indonesia dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) pada tahun 2030.

Tim Negara PBB dipimpin oleh Resident Coordinator (disingkat RC) PBB, yang merupakan perwakilan tertinggi dari sistem pembangunan PBB di tingkat negara. RC memimpin Tim Negara PBB dalam konsultasi dengan Pemerintah untuk mendefinisikan dan menyepakati tanggapan strategis PBB terhadap prioritas pembangunan Pemerintah dalam mengimplementasikan Agenda 2030. Resident Coordinator adalah perwakilan yang ditunjuk dan melapor kepada Sekretaris Jenderal PBB.